

BAB III

KEBIJAKAN UMUM

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 meliputi kebijakan umum Pendapatan dan kebijakan umum Belanja.

Pengelolaan keuangan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun anggaran 2014 struktur APBD-nya berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang terakhir telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dimana struktur belanja secara runtut dimulai dari urusan, organisasi, belanja tidak langsung (meliputi : Jenis, Obyek dan Rincian obyek belanja) dan belanja langsung (meliputi : Jenis, Obyek dan Rincian obyek belanja).

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Kebijakan Umum Pendapatan

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu (tahun berjalan / tahun berkenaan adalah tahun anggaran 2014) yang menjadi hak daerah. Pendapatan daerah menurut sumbernya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang sah. Pendapatan Asli Daerah utamanya sektor pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pendapatan yang memungkinkan untuk dioptimalkan, sedangkan pendapatan dari dana perimbangan kenaikan sangat tergantung kebijakan pemerintah pusat.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2014 pada sisi Pendapatan adalah optimalisasi dan intensifikasi / ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dan diupayakan tanpa membebani masyarakat.



Kebijakan ini diarahkan untuk mencapai sasaran **meningkatnya kemandirian keuangan daerah.**

2. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Upaya untuk merealisasikan target pendapatan asli daerah pada tahun 2014 dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Kebijakan desentralisasi yang memberikan otonomi yang lebih besar Kepada Daerah memberikan inspirasi bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menarik investor dan pelaku ekonomi masuk di Kabupaten Sidoarjo melalui pelayanan satu atap yang cepat dan efisien.

Intensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan melakukan upaya yang lebih serius untuk memungut pajak dan retribusi yang ada dengan meningkatkan upaya pemberian pelayanan yang maksimal dan debirokrasi aturan sehingga masyarakat diberikan kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga diharapkan adanya dampak positif yaitu pengurangan jumlah tunggakan pajak dan retribusi, penambahan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi, peningkatan jumlah penerimaan pajak dan retribusi.

Selain itu, ekstensifikasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan upaya peningkatan di bidang investasi daerah, pemulihan kepercayaan juga merupakan faktor penting. Masalah yang kita hadapi bukanlah sekedar bagaimana menyeimbangkan investasi daerah dan fokus sasaran yang utama yang berkaitan dengan potensi daerah. Masalah yang kita hadapi adalah bagaimana menyeimbangkan dengan cara-cara yang tidak merusak kepercayaan para pelaku ekonomi dan kalau dapat justru mendorong pulihnya kepercayaan itu, dengan kata lain upaya yang dapat dilakukan dengan melibatkan secara penuh pihak swasta / lain dengan memberikan fasilitas kemudahan dalam aturan dan kejelasan dalam berinvestasi, selain itu



upaya yang dilakukan adalah meningkatkan fungsi kawasan seperti di Industrial Estate di wilayah Sidoarjo dan kawasan sepanjang ruas Waru – Krian, Sidoarjo - Krian dan wilayah lain yang berpotensi sebagai kawasan industri dan perdagangan.

Upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi dan beberapa kegiatan dimaksud antara lain :

- a) Adanya perilaku sebagian masyarakat yang dengan sengaja menghindari pajak, kecenderungan ini memotivasi kita untuk selalu mencari terobosan
- b) Agar masyarakat semakin sadar membayar pajak dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :
 - Memberikan pemahaman tentang manfaat dan pengertian pajak dengan kegiatan gelar sadar dan peduli pajak serta dialog interaktif melalui media elektronik (Radio);
 - Peningkatan kesadaran masyarakat agar melaksanakan program *Billing system* dan undian berhadiah;
 - Operasi terpadu dengan instansi terkait dalam rangka memberikan *shock therapy* kepada wajib pajak yang kurang patuh;
 - Menggali potensi pajak dengan melakukan survey terhadap obyek pajak, melakukan identifikasi masalah, evaluasi tentang perolehan pendapatan pajak daerah, kajian tentang peningkatan pendapatan daerah, penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah dan membuat media penyuluhan yang informatif agar mudah dimengerti masyarakat.



3. Target Dan Realisasi Pendapatan.

Target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2014 adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	LEBIH / KURANG	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN				
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.003.045.392.951,00	1.115.492.034.740,16	112.446.641.789,16	111,21
1.2.	DANA PERIMBANGAN	1.425.650.988.426,00	1.403.069.829.236,00	(22.581.159.190,00)	98,42
1.3.	LAIN -LAIN PENDAPATAN YANG SAH	699.838.951.340,00	754.977.188.259,00	55.275.336.919,00	107,90
	JUMLAH PENDAPATAN	3.128.535.332.717,00	3.273.539.052.235,16	145.140.819.518,16	104,64

Sumber Data : DPPKA Unaudited BPK

Realisasi seluruh pendapatan daerah pada tahun 2014 sebesar Rp. 3.273.539.052.235,16 atau 104,64% dari target/anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3.128.535.332.717,00, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 2.699.453.827.776,95 meningkat sebesar Rp. 574.085.224.458,21 atau 21,27%.

Peningkatan terbesar dari komponen, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Restoran, peningkatan jenis pajak ini memberi gambaran meningkatnya tingkat kemampuan daya beli dan kesejahteraan masyarakat serta karena upaya dan kerja keras dari jajaran DPPKA Kabupaten Sidoarjo dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.

Realisasi pendapatan daerah tahun 2014 secara umum tercapai, dengan penjelasan sebagai berikut :

3.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2014 sebesar Rp. 1.115.492.034.740,16 atau tercapai sebesar 111,21% dari



seluruh target PAD sebesar Rp. 1.003.045.392.951,00 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 862.617.340.329,95 meningkat sebesar Rp. 252.874.694.410,21 atau 29,31%.

Tercapainya target PAD ini dan meningkatnya penerimaan PAD berkat usaha keras dari seluruh instansi di jajaran pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Rincian realisasi dan target PAD tahun 2014 adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	LEBIH / KURANG	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1.	Pajak Daerah	597.600.000.000,00	614.284.967.311,40	16.684.967.311,40	102,79
1.1.2.	Retribusi Daerah	93.348.244.300,00	96.645.390.259,65	3.297.145.959,65	103,53
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	25.086.553.941,00	30.401.391.940,50	5.314.837.999,50	121,19
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	287.010.594.710,00	374.160.285.228,61	87.149.690.518,61	130,36
	JUMLAH	1.003.045.392.951,00	1.115.492.034.740,16	112.446.641.789,16	111,21

Sumber Data : DPKKA Unaudited BPK

Dari keseluruhan komponen PAD, realisasinya telah melebihi target yang ditentukan (lebih dari 100%).

a. Pajak Daerah

Pajak daerah tahun 2014 realisasinya tercapai sebesar Rp. 614.284.967.311,40 atau 102,79% dari seluruh target penerimaan pajak daerah.

Seluruh realisasi Pajak Daerah melebihi dari target yang ditentukan (lebih dari 100%), dan apabila dibandingkan dengan realisasi pajak daerah tahun 2013 sebesar Rp. 524.764.658.686,30 meningkat sebesar Rp. 89.520.308.625,10 atau 17,06%.



Komponen pajak daerah yang memberikan kontribusi tertinggi adalah pada jenis Pajak Hiburan dan Pajak Hotel.

JENIS / OBYEK PAJAK	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Pajak Daerah	597.600.000.000,00	614.284.967.311,40	16.684.967.311,40	102,79
<i>Pajak Hotel</i>	6.650.000.000,00	7.871.362.567,00	1.221.362.567,00	118,37
<i>Pajak Restoran</i>	32.850.000.000,00	35.704.066.197,90	2.854.066.197,90	108,69
<i>Pajak Hiburan</i>	2.400.000.000,00	3.176.076.014,00	776.076.014,00	132,34
<i>Pajak Reklame</i>	8.500.000.000,00	8.746.985.777,00	246.985.777,00	102,91
<i>Pajak Penerangan Jalan</i>	200.900.000.000,00	206.180.972.606,50	5.280.972.606,50	102,63
<i>Pajak Parkir</i>	11.000.000.000,00	11.949.963.875,00	949.963.875,00	108,64
<i>Pajak Air tanah</i>	1.500.000.000,00	1.559.679.517,00	59.679.517,00	103,98
<i>Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan</i>	153.000.000.000,00	157.683.880.579,00	4.683.880.579,00	103,06
<i>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</i>	180.800.000.000,00	181.411.980.178,00	611.980.178,00	100,34

Sumber Data : DPKKA Unaudited BPK

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah tahun 2014 terealisasi sebesar Rp. 96.645.390.259,65 atau tercapai 103,53% dari seluruh target retribusi daerah yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 90.778.249.918,04 meningkat sebesar Rp. 5.867.140.341,61 atau 6,46%.

JENIS / OBYEK RETRIBUSI	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Retribusi Daerah	93.348.244.300,00	96.645.390.259,65	3.297.145.959,65	103,53
<i>Retribusi Jasa Umum</i>	24.479.254.200,00	23.942.846.333,00	(536.407.867,00)	97,81
<i>Retribusi Jasa Usaha</i>	31.765.488.500,00	31.867.601.724,00	102.113.224,00	100,32
<i>Retribusi Perijinan Tertentu</i>	37.103.501.600,00	40.834.942.202,65	3.731.440.602,65	110,06

Sumber Data : DPKKA Unaudited BPK



Adapun perincian komposisi **Retribusi Jasa Umum**, yaitu sebagai berikut :

JENIS / OBYEK	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Retribusi Jasa Umum	24.479.254.200,00	23.942.846.333,00	(536.407.867,00)	97,81
Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.566.374.200,00	6.262.836.500,00	(303.537.700,00)	95,38
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.319.240.000,00	1.323.438.000,00	(995.802.000,00)	57,06
Retribusi Biaya Pengurusan Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	172.500.000,00	237.730.000,00	65.230.000,00	137,81
Retribusi Pelayanan Pasar	9.920.600.000,00	9.881.209.475,00	(39.390.525,00)	99,60
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.400.000.000,00	3.979.395.000,00	579.395.000,00	117,04
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	220.540.000,00	226.491.500,00	5.951.500,00	102,70
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.880.000.000,00	2.031.745.858,00	151.745.858,00	108,07
JUMLAH	24.479.254.200,00	23.942.846.333,00	(536.407.867,00)	97,81

Sumber Data : DPPKA Unaudited BPK

Adapun perincian komposisi **Retribusi Jasa Usaha**, yaitu sebagai berikut :

JENIS / OBYEK	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Retribusi Jasa Usaha	31.765.488.500,00	31.867.601.724,00	102.113.224,00	100,32
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.640.236.000,00	2.564.842.974,00	(75.393.026,00)	97,14
Retribusi Terminal	530.000.000,00	751.342.000,00	221.342.000,00	141,76
Retribusi Rumah Potong Hewan	1.397.635.000,00	1.526.277.100,00	128.642.100,00	109,20
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.265.210.000,00	1.452.124.150,00	186.914.150,00	114,77
Retribusi Parkir	25.932.407.500,00	25.573.015.500,00	(359.392.000,00)	98,61
JUMLAH	31.765.488.500,00	31.867.601.724,00	102.113.224,00	100,32

Sumber Data : DPPKA Unaudited BPK



Sedangkan untuk **Retribusi Perijinan Tertentu**, terinci sebagai berikut :

JENIS / OBYEK	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Retribusi Perizinan Tertentu	37.103.501.600,00	40.834.942.202,65	3.731.440.602,65	110,06
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	28.291.575.600,00	31.311.596.847,65	3.020.021.247,65	110,67
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	8.700.000.000,00	9.451.724.355,00	751.724.355,00	108,64
Retribusi Izin Trayek	69.426.000,00	71.621.000,00	2.195.000,00	103,16
Surat Ijin Usaha Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	0,00	0,00	0,00	0,00
Tanda Daftar Industri (TDI)	0,00	0,00	3.773.940.602,65	0,00
Retribusi Pemeriksaan Hasil asal hewan dan bahan asal hewan	11.000.000,00	0,00	4.527.859.957,65	0,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dibawah 200 M2	31.500.000,00	0,00	8.303.995.560,30	0,00
JUMLAH	37.103.501.600,00	40.834.942.202,65	20.379.736.723,25	110,06

Sumber Data : DPPKA Unaudited BPK

c. Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Pendapatan hasil BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2014 sebesar Rp. 25.086.553.941,00 dan terealisasi sebesar Rp. 30.401.391.940,50 atau tercapai sebesar 121,19%.

Kontribusi terbesar dari *Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan* yaitu berasal dari penerimaan deviden PT. Bank Jatim dan PDAM "Delta Tirta".

JENIS / OBYEK	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta"	4.000.000.000,00	10.070.489.310,00	6.070.489.310,00	251,76
PD Aneka Usaha Unit Percetakan Delta Grafika	935.000.000,00	179.319.621,00	(755.680.379,00)	19,18
BPR "Delta Artha"	5.119.553.941,00	5.119.553.941,00	0,00	100,00
Bank Jatim	15.032.000.000,00	15.032.029.068,50	29.068,50	100,00
JUMLAH	25.086.553.941,00	30.401.391.940,50	5.314.837.999,50	121,19

Sumber Data : DPPKA Unaudited BPK



d. Penerimaan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan lain – lain PAD tahun 2014 sebesar Rp. 387.838.466.466,61 atau tercapai 130,36%, dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 287.010.594.710,00.

Kontribusi terbesar Penerimaan lain-lain PAD berasal dari penerimaan Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

JENIS / OBYEK	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	287.010.594.710,00	387.838.466.466,61	100.827.871.756,61
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan Secara Tunai atau Angsuran Cicilan	0,00	791.269.464,12	791.269.464,12
Penerimaan Jasa Giro	6.750.000.000,00	7.889.904.138,72	1.139.904.138,72
Pendapatan Bunga Deposito	24.200.000.000,00	43.222.514.301,82	19.022.514.301,82
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	73.905.000,00	73.905.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	2.962.506.261,86	2.962.506.261,86
Pendapatan Denda Pajak	0,00	451.093.445,00	451.093.445,00
Pendapatan Denda Retribusi	0,00	209.833.710,00	209.833.710,00
Pendapatan Hasil eksekusi Atas Jaminan	0,00	5.797.904.238,34	5.797.904.238,34
Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	2.207.404.760,83	2.207.404.760,83
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	444.000.000,00	497.125.382,20	53.125.382,20
Pendapatan Dari Sewa Aset Pemda (Rumah/Gedung/Tanah/Lahan)	2.121.113.878,00	2.874.894.240,00	753.780.362,00
Pendapatan Dari Kesepakatan dan Kerjasama	460.848.832,00	546.708.700,00	85.859.868,00
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	219.000.000.000,00	267.737.267.757,34	48.737.267.757,34
Penjualan Hasil Perikanan	184.600.000,00	185.662.500,00	1.062.500,00
Penjualan Hasil Raskin	582.720.000,00	466.176.000,00	(116.544.000,00)
Penjualan Hasil Pasar Murah	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
Penerimaan Lain-lain	0,00	547.460.828,38	547.460.828,38
Pendapatan dari BPJS	11.221.116.000,00	15.844.806.000,00	4.623.690.000,00
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	21.911.196.000,00	21.718.848.500,00	(192.347.500,00)
JUMLAH	287.010.594.710,00	374.160.285.228,61	87.149.690.518,61

Sumber Data : DPPKA Unaudited BPK



3.2. Pendapatan Dana Perimbangan

Pendapatan dana perimbangan tahun 2014 terealisasi sebesar Rp. 1.403.069.829.236,00 atau 98,42% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.425.650.988.426,00. Kontribusi terbesar pencapaian target ini berasal dari Dana Alokasi Umum. Rincian target dan realisasi pendapatan dana perimbangan adalah sebagai berikut :

JENIS / OBYEK	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Dana Perimbangan	1.425.650.988.426,00	1.403.069.829.236,00	(22.581.159.190,00)	98,42
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	148.145.024.426,00	145.181.317.236,00	(2.963.707.190,00)	98,00
Bagi Hasil Pajak	119.931.624.032,00	114.776.910.245,00	(5.154.713.787,00)	95,70
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	28.213.400.394,00	30.404.406.991,00	2.191.006.597,00	107,77
Dana Alokasi Umum	1.199.036.154.000,00	1.199.036.154.000,00	0,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	78.469.810.000,00	58.852.358.000,00	(19.617.452.000,00)	75,00
DAK Pendidikan	40.402.750.000,00	30.302.063.000,00	(10.100.687.000,00)	75,00
DAK Kesehatan	4.558.040.000,00	3.418.530.000,00	(1.139.510.000,00)	75,00
DAK Keluarga Berencana	1.221.420.000,00	916.065.000,00	(305.355.000,00)	75,00
DAK Infrastruktur Jalan	8.245.200.000,00	6.183.900.000,00	(2.061.300.000,00)	75,00
DAK Infrastruktur Irigasi	3.205.310.000,00	2.403.982.500,00	(801.327.500,00)	75,00
DAK Infrastruktur Air Minum	2.871.960.000,00	2.153.970.000,00	(717.990.000,00)	75,00
DAK Kelautan dan Perikanan	5.050.860.000,00	3.788.145.000,00	(1.262.715.000,00)	75,00
DAK Pertanian	6.405.430.000,00	4.804.072.500,00	(1.601.357.500,00)	75,00
DAK Lingkungan Hidup	1.373.180.000,00	1.029.885.000,00	(343.295.000,00)	75,00
DAK Perdagangan	3.029.870.000,00	2.272.402.500,00	(757.467.500,00)	75,00
DAK Keselamatan Transportasi Darat	677.370.000,00	508.027.500,00	(169.342.500,00)	75,00
DAK Infrastruktur Sanitasi	1.428.420.000,00	1.071.315.000,00	(357.105.000,00)	75,00

Sumber Data : DPPKA Unadited BPK



a. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Pendapatan bagi hasil pajak periode tahun 2014 terealisasi sebesar Rp. 114.776.910.245,00 atau 95,70% dari target yang ditetapkan, pendapatan bagi hasil bukan pajak sebesar Rp. 30.404.406.991,00 atau 107,77% dari target.

Kontribusi terbesar dari penerimaan bagi hasil pajak berasal dari pendapatan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan, dan pendapatan Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21.

Sedangkan penerimaan bagi hasil bukan pajak, kontribusi terbesar berasal dari Bagi Hasil cukai, Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum tahun 2014 yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 1.199.036.154.000,00 terealisasi Rp. 1.199.036.154.000,00 atau 100% dari target yang ditetapkan.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus tahun 2014 yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 78.469.810.000,00, terealisasi sebesar Rp. 58.852.358.000,00 atau 75% dari target yang ditetapkan.

3.3 Lain – Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah bersumber dari :

- a) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat tercapai sebesar Rp. 11.567.000.000,00 atau (192,78%) dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000.000,00;



- b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terealisasi sebesar Rp. 346.218.777.259,00 atau 117,23% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 295.322.857.793,00;
- c) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terealisasi sebesar Rp. 354.710.934.000,00 atau 100,0045% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 354.694.923.000,00;
- d) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar Rp. 42.480.477.000,00 atau 100,22% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 42.522.977.000,00;
- e) Sedangkan Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Dana Bagi Hasil Retribusi dari Kota Surabaya tidak terealisasi.

Realisasi atas Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terinci sebagai berikut :

JENIS / OBYEK	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	699.838.951.340,00	754.977.188.259,00	(1.364.936.770,00)	107,90
Pendapatan hibah dari Pemerintah	6.000.000.000,00	11.567.000.000,00	(177.354.223,00)	192,78
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya	295.500.212.016,00	346.218.777.259,00	(177.354.223,00)	117,16
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	295.322.857.793,00	346.218.777.259,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi	177.354.223,00	0,00	(177.354.223,00)	0,00
Dana Bagi Hasil Retribusi dari Kota	1.120.839.324,00	0,00	(1.120.839.324,00)	0,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	354.694.923.000,00	354.710.934.000,00	16.011.000,00	100,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	42.522.977.000,00	42.480.477.000,00	94.600.000,00	100,22

Sumber Data : DPPKA Unaudited BPK

4. Permasalahan dan Solusi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

Dalam upayanya untuk mencapai target pendapatan asli daerah di temukan beberapa permasalahan.

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain :

- a. Perlu adanya beberapa pembenahan sistem pengelolaan pendapatan termasuk peningkatan kualitas layanan.
- b. Adanya kecenderungan wajib pajak menunda waktu penyetoran pajak.
- c. Ada kecenderungan masyarakat untuk menghindari pajak
- d. Ada sebagian masyarakat yang belum mengerti akan pemanfaatan pajak dalam pembangunan.
- e. Diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan pendapatan

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi serta untuk menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Mengadakan koordinasi dan pendekatan dengan sektor terkait serta membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pihak baik dalam lingkungan pemerintahan, kalangan pengusaha akademisi maupun masyarakat.
- b. Memberikan pemahaman pada masyarakat akan pengertian pajak dan memanfaatkannya bagi pembangunan
- c. Mengadakan program terobosan sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak makin meningkat, misalnya Program *billing system* dan melakukan *shock therapy* pada WP yang tidak patuh.
- d. Menjaga keakurasian data potensi pajak dengan tetap konsisten melaksanakan pemantauan dan pembinaan.



- e. Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara terus menerus dalam melakukan peningkatan kualitas pelayanan.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Umum Belanja

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan terakhir dengan dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2012 belanja terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan undang-undang, serta belanja menurut fungsi.

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif maka Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Sidoarjo yang didasarkan pada RPJMD Tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut :

1.1. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) :

- 1) Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat;
- 2) Peningkatan tingkat kesehatan masyarakat;

1.2. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) :

- 1) Peningkatan daya saing sumber daya manusia
- 2) Peningkatan daya beli masyarakat
- 3) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk



- 1.3. **Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan Peningkatan potensi dan daya saing daerah dan Peningkatan pertumbuhan ekonomi** yaitu :
Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui kontribusi sektor UMKM dan koperasi, industri perdagangan, jasa, pariwisata dan pertanian serta sektor ketenagakerjaan pada PDRB melalui peningkatan daya saing.
- 1.4. **Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan Peningkatan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian dan beriman** yaitu :
 - 1) Peningkatan modal sosial pembangunan
 - 2) Peningkatan ketertiban masyarakat melalui penegakan supremasi hukum secara konsisten dan berkelanjutan
- 1.5. **Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan** yaitu :
 - 1) Peningkatan pemerataan pembangunan masyarakat
 - 2) Peningkatan peranan wanita dalam pembangunan
- 1.6. **Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan Peningkatan transparansi, profesionalisme dan produktivitas aparatur**, yaitu :
 - 1) Peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah melalui *public service excellence*.
 - 2) Peningkatan produktivitas aparatur
 - 3) Pengembangan budaya pemerintahan bersih, akuntabel, transparan, dan bebas korupsi
 - 4) Pengembangan pengelolaan SDM pemerintahan berbasis kompetensi



1.7. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan Peningkatan pelayanan publik :

- 1) Pengembangan data dan sistem IT pendukung pelayanan umum
- 2) Pengelolaan tata laksana pemerintah secara efektif

1.8. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan Peningkatan investasi yang berdaya dukung tinggi dan Optimalisasi Pembangunan infrastruktur daerah :

- 1) Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah
- 2) Pengembangan investasi berdaya dukung tinggi
- 3) Pengembangan sumber-sumber dana pembangunan

1.9. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan Peningkatan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup :

- 1) Peningkatan efektivitas penanganan bencana
- 2) Optimalisasi pelestarian dan kualitas lingkungan hidup

1.10. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan Menumbuhkembangkan iklim demokrasi yang kondusif dan peningkatan peran serta masyarakat dalam berpolitik :

- 1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam berpolitik
- 2) Peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

2. Target Dan Realisasi Belanja

Target belanja daerah untuk tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 3.577.576.573.478,34, dari target tersebut pada tahun 2014



berhasil direalisasikan sebesar Rp. 3.006.567.451.395,01 atau tercapai sebesar 84,04%, dengan rincian sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	SISA LEBIH	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2	BELANJA DAERAH	3.577.576.573.478,34	3.006.567.451.395,01	(570.872.022.083,33)	84,04
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.781.835.997.465,14	1.576.227.733.090,00	(205.608.264.375,14)	88,46
2.2.	BELANJA LANGSUNG	1.795.740.576.013,20	1.430.339.718.305,01	(365.263.757.708,19)	79,66
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.577.576.573.478,34	3.006.567.451.395,01	(570.872.022.083,33)	84,04

Sumber Data : DPPKA Unaudited BPK

Penjelasan lebih lanjut terhadap penyerapan belanja daerah sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp. 1.576.227.733.090,00 atau 88,46% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.781.835.997.465,14.

Belanja hibah, Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi / Kabupaten / Kota dan Pemdes, serta Belanja Bantuan Keuangan Propinsi / Kabupaten / Kota dan Pemdes rata – rata terserap diatas 90% dari jumlah yang dianggarkan.

Rincian realisasi belanja tidak langsung adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	SISA LEBIH	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.1.	Belanja Tidak Langsung	1.781.835.997.465,14	1.576.227.733.090,00	(205.608.264.375,14)	88,46
2.1.1.				0,00	
2.1.2.	Belanja Pegawai	1.489.025.409.271,14	1.304.218.353.014,00	(184.807.056.257,14)	87,59
2.1.3.	Belanja Hibah	69.442.360.000,00	67.486.363.850,00	(1.955.996.150,00)	97,18
2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	61.238.340.000,00	48.738.240.000,00	(12.500.100.000,00)	79,59



2.1.5.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	57.306.308.285,00	54.839.162.759,00	(2.467.145.526,00)	95,69
2.1.6.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	101.370.537.909,00	99.151.842.523,00	(2.218.695.386,00)	97,81
	Belanja Tidak Terduga	3.453.042.000,00	1.793.770.944,00	(1.659.271.056,00)	51,95
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG		1.781.835.997.465,14	1.576.227.733.090,00	(205.608.264.375,14)	88,46

Belanja Tidak Langsung	1.781.835.997.465,14	1.576.227.733.090,00	(205.608.264.375,14)	88,46
Belanja Pegawai	1.489.025.409.271,14	1.304.218.353.014,00	(184.807.056.257,14)	87,59
Gaji dan Tunjangan	1.267.050.809.764,14	1.132.671.008.316,00	(134.379.801.448,14)	89,39
Tambahan Penghasilan PNS	168.751.112.500,00	127.612.923.174,00	(41.138.189.326,00)	75,62
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	5.023.000.000,00	4.965.600.000,00	(57.400.000,00)	98,86
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	4.289.103.722,00	0,00	(4.289.103.722,00)	0,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	39.171.571.170,00	34.850.355.936,00	(4.321.215.234,00)	88,97
Insentif pemungutan Retribusi Daerah	4.739.812.115,00	4.118.465.588,00	(621.346.527,00)	86,89
Belanja Hibah	69.442.360.000,00	67.486.363.850,00	(1.955.996.150,00)	97,18
Belanja Hibah Kepada Pemerintah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Hibah Kepada Masyarakat	48.065.360.000,00	46.681.197.500,00	(1.384.162.500,00)	97,12
Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	21.077.000.000,00	20.505.166.350,00	(571.833.650,00)	97,29
Belanja Bantuan Sosial	61.238.340.000,00	48.738.240.000,00	(12.500.100.000,00)	79,59
Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga, dan/atau Masyarakat	13.380.240.000,00	9.157.440.000,00	(4.222.800.000,00)	68,44
Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan	47.164.500.000,00	39.580.800.000,00	(7.583.700.000,00)	83,92
Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan	693.600.000,00	0,00	(693.600.000,00)	0,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	57.306.308.285,00	54.839.162.759,00	(2.467.145.526,00)	95,69
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	47.280.000.000,00	46.868.748.832,00	(411.251.168,00)	99,13
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.510.850.160,00	3.462.916.927,00	(47.933.233,00)	98,63



Belanja Bagi Hasil Reribusi Daerah Kepada Pemerintah Propinsi	6.515.458.125,00	4.507.497.000,00	(2.007.961.125,00)	69,18
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	101.370.537.909,00	99.151.842.523,00	(2.218.695.386,00)	97,81
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	100.442.793.520,00	98.309.152.805,00	(2.133.640.715,00)	97,88
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	927.744.389,00	842.689.718,00	(85.054.671,00)	90,83
Belanja Tidak Terduga	3.453.042.000,00	1.793.770.944,00	(1.659.271.056,00)	51,95
Belanja Tidak Terduga	3.453.042.000,00	1.793.770.944,00	(1.659.271.056,00)	51,95

Sumber Data : DPPKA Unaudited BPK

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung tahun 2014 terealisasi sebesar Rp. 1.444.017.899.543,01 atau 80,42% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1.795.740.576.013,20. Kontribusi terbesar untuk anggaran yang terserap berasal dari belanja barang dan jasa yaitu terserap sebesar Rp. 709.527.966.903,86 atau 89,75% dari anggarannya.

Rincian realisasi belanja langsung adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	SISA LEBIH	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.2.	BELANJA LANGSUNG	1.795.740.576.013,20	1.444.017.899.543,01	(351.585.576.470,19)	80,42
2.2.1.	Belanja Pegawai	52.307.632.438,00	43.331.484.939,81	(8.839.047.498,19)	83,06
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	790.529.445.755,66	709.527.966.903,86	(81.001.478.851,80)	89,75
2.2.3.	Belanja Modal	952.903.497.819,54	691.158.447.699,34	(261.745.050.120,20)	72,53
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	1.795.740.576.013,20	1.444.017.899.543,01	(351.585.576.470,19)	80,42

Sumber Data : DPPKA Unaudited BPK



Secara rinci penyerapan belanja langsung sebagai berikut :

Belanja Langsung	1.795.740.576.013,20	1.430.339.718.305,01	(365.263.757.708,19)	79,66
Belanja Pegawai	52.307.632.438,00	43.331.484.939,81	(8.839.047.498,19)	83,06
Honorarium PNS	31.388.059.783,00	25.552.979.187,81	(5.835.080.595,19)	81,41
Honorarium Non PNS	10.963.712.000,00	9.022.487.000,00	(1.804.125.000,00)	83,34
Uang Lembur	3.065.860.655,00	2.159.693.056,00	(906.167.599,00)	70,44
Belanja Pegawai Dana BOS	6.890.000.000,00	6.596.325.696,00	(293.674.304,00)	95,74
Belanja Barang dan Jasa	790.529.445.755,66	695.849.785.665,86	(94.679.660.089,80)	88,02
Belanja Bahan Pakai Habis	40.631.603.606,00	32.317.798.245,00	(8.313.805.361,00)	79,54
Belanja Bahan/Material	39.942.964.026,00	35.888.159.457,00	(4.054.804.569,00)	89,85
Belanja Jasa Kantor	111.686.945.414,00	102.086.842.330,00	(9.600.103.084,00)	91,40
Belanja Premi Asuransi	1.250.000.000,00	1.215.189.670,00	(34.810.330,00)	97,22
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.575.369.772,00	6.182.671.648,00	(1.392.698.124,00)	81,62
Belanja Cetak dan Penggandaan	19.378.820.656,00	15.994.748.071,00	(3.384.072.585,00)	82,54
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.767.325.100,00	1.389.645.000,00	(377.680.100,00)	78,63
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	933.770.000,00	809.332.500,00	(124.437.500,00)	86,67
Belanja Sewa Alat Berat	275.000.000,00	256.786.000,00	(18.214.000,00)	93,38
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.674.323.000,00	3.356.350.729,00	(317.972.271,00)	91,35
Belanja Makanan Dan Minuman	28.448.165.750,00	22.873.439.220,00	(5.574.726.530,00)	80,40
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.557.470.000,00	1.464.098.844,00	(93.371.156,00)	94,00
Belanja Pakaian Kerja/Perlengkapan Kerja Lapangan	4.440.475.000,00	3.731.262.800,00	(709.212.200,00)	84,03
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	2.116.884.200,00	1.977.526.200,00	(139.358.000,00)	93,42
Belanja Perjalanan Dinas	73.837.673.967,00	57.666.219.385,00	(16.171.454.582,00)	78,10
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	486.800.000,00	472.150.000,00	(14.650.000,00)	96,99
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	24.452.196.980,00	20.247.639.364,00	(4.204.557.616,00)	82,80
Belanja Pemeliharaan	110.862.506.320,00	102.582.171.675,00	(8.280.334.645,00)	92,53
Belanja Jasa Konsultansi	23.591.670.304,00	19.488.420.850,00	(4.103.249.454,00)	82,61
Belanja Barang Dana Bos	18.609.050.000,00	18.239.645.115,00	(369.404.885,00)	98,01
Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.608.047.798,00	5.065.206.300,00	(2.542.841.498,00)	66,58
Belanja Barang yang akan dijual kepada masyarakat/Pihak Ketiga	3.460.000.000,00	2.753.352.000,00	(706.648.000,00)	79,58
Belanja Jasa Pemeriksaan	154.900.000,00	145.475.752,00	(9.424.248,00)	93,92



Kesehatan				
Belanja Penyedia Jasa	3.863.288.208,00	3.669.533.375,00	(193.754.833,00)	94,98
Belanja barang dan jasa BLUD	211.825.449.454,66	213.847.246.757,86	2.021.797.303,20	100,95
Belanja Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin	29.704.050.000,00	8.301.144.958,00	(21.402.905.042,00)	27,95
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	17.464.796.200,00	12.927.679.420,00	(4.537.116.780,00)	74,02
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	929.900.000,00	900.050.000,00	(29.850.000,00)	96,79
Belanja Modal	952.903.497.819,54	691.158.447.699,34	(261.745.050.120,20)	72,53
Belanja Modal Pengadaan Tanah	77.731.386.101,00	21.285.974.582,00	(56.445.411.519,00)	27,38
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	11.938.150.000,00	10.688.777.942,00	(1.249.372.058,00)	89,53
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	49.233.046.463,00	44.204.430.830,00	(5.028.615.633,00)	89,79
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	1.063.800.000,00	950.489.000,00	(113.311.000,00)	89,35
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	435.000.000,00	403.200.000,00	(31.800.000,00)	92,69
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	100.000.000,00	97.680.000,00	(2.320.000,00)	97,68
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	855.002.200,00	663.210.000,00	(191.792.200,00)	77,57
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	1.211.287.000,00	208.971.000,00	(1.002.316.000,00)	17,25
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.043.673.825,00	4.710.874.250,00	(1.332.799.575,00)	77,95
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.268.231.059,00	7.276.692.051,00	(991.539.008,00)	88,01
Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.256.852.448,00	12.300.570.293,00	(1.956.282.155,00)	86,28
Belanja Modal Pengadaan Meubeuleur	10.907.267.100,00	9.193.133.924,00	(1.714.133.176,00)	84,28
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	450.799.420,00	321.887.091,00	(128.912.329,00)	71,40
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	367.000.000,00	170.323.000,00	(196.677.000,00)	46,41
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3.676.335.290,00	3.308.658.469,00	(367.676.821,00)	90,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	715.775.200,00	663.460.250,00	(52.314.950,00)	92,69
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	904.672.500,00	852.565.500,00	(52.107.000,00)	94,24
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	7.613.231.669,00	4.762.796.215,00	(2.850.435.454,00)	62,56
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	14.616.908.545,00	966.196.500,00	(13.650.712.045,00)	6,61
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	174.063.210.760,00	148.073.023.965,00	(25.990.186.795,00)	85,07
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	40.281.570.479,00	35.750.410.525,34	(4.531.159.953,66)	88,75



Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	156.405.727.117,00	145.657.674.150,00	(10.748.052.967,00)	93,13
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota	22.004.993.054,00	20.178.028.700,00	(1.826.964.354,00)	91,70
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	38.132.575.425,00	33.057.238.323,00	(5.075.337.102,00)	86,69
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	188.094.509.435,54	133.066.780.863,00	(55.027.728.572,54)	70,74
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	50.158.736.780,00	699.985.400,00	(49.458.751.380,00)	1,40
Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	201.325.000,00	185.643.000,00	(15.682.000,00)	92,21
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	987.152.000,00	980.397.550,00	(6.754.450,00)	99,32
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	85.700.000,00	83.330.000,00	(2.370.000,00)	97,23
Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	8.096.975.000,00	4.275.374.000,00	(3.821.601.000,00)	52,80
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Perindustrian	120.990.000,00	116.175.000,00	(4.815.000,00)	96,02
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pembangkit Energi	315.850.000,00	310.441.800,00	(5.408.200,00)	98,29
Belanja Modal BLUD	41.139.663.949,00	36.560.808.721,00	(4.578.855.228,00)	88,87
Belanja Modal Dana Bos	8.652.500.000,00	8.314.284.805,00	(338.215.195,00)	96,09
Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembelajaran Sekolah	13.773.600.000,00	818.960.000,00	(12.954.640.000,00)	5,95

Sumber Data : DPPKA Unaudited BPK

3. Target Dan Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan

Sesuai dengan kebijakan umum belanja dan dalam rangka mencapai sasaran program dan kegiatan tahun 2014, rincian realisasi Total Belanja Tidak Langsung sebagaimana dalam tabel 3.1, sedangkan realisasi Total Belanja Langsung sebagaimana dalam tabel 3.2 menurut urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :



Tabel 3.1
Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2014

Kode	SKPD	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
URUSAN WAJIB					
01	Pendidikan	1.053.543.954.164,14	910.088.512.824,00	(143.455.441.340,14)	86,38
0101	Dinas Pendidikan	1.053.543.954.164,14	910.088.512.824,00	(143.455.441.340,14)	86,38
02	Kesehatan	126.941.516.610,00	123.374.001.803,00	(3.567.514.807,00)	97,19
0101	Dinas Kesehatan	84.901.976.610,00	82.935.103.866,00	(1.966.872.744,00)	97,68
0202	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	42.039.540.000,00	40.438.897.937,00	(1.600.642.063,00)	96,19
03	Pekerjaan Umum	22.230.184.300,00	17.790.015.504,00	(4.440.168.796,00)	80,03
0101	Dinas PU Bina Marga	4.667.350.000,00	3.936.125.447,00	(731.224.553,00)	84,33
0201	Dinas PU Pengairan	12.777.540.000,00	9.878.433.622,00	(2.899.106.378,00)	77,31
0301	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang	4.785.294.300,00	3.975.456.435,00	(809.837.865,00)	83,08
06	Perencanaan Pembangunan	4.489.760.000,00	4.119.040.959,00	(370.719.041,00)	91,74
0101	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.489.760.000,00	4.119.040.959,00	(370.719.041,00)	91,74
07	Perhubungan	9.538.771.675,00	8.681.058.802,00	(857.712.873,00)	91,01
0101	Dinas Perhubungan	9.538.771.675,00	8.681.058.802,00	(857.712.873,00)	91,01
08	Lingkungan Hidup	21.950.327.000,00	19.432.653.092,00	(2.517.673.908,00)	88,53
0101	Badan Lingkungan Hidup	3.295.160.000,00	2.865.780.793,00	(429.379.207,00)	86,97
0201	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	18.655.167.000,00	16.566.872.299,00	(2.088.294.701,00)	88,81
10	Kependudukan dan Catatan Sipil	3.536.540.000,00	3.219.971.350,00	(316.568.650,00)	91,05
0101	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.536.540.000,00	3.219.971.350,00	(316.568.650,00)	91,05
13	Sosial	6.872.920.000,00	6.267.264.315,00	(605.655.685,00)	91,19
0101	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	6.872.920.000,00	6.267.264.315,00	(605.655.685,00)	91,19
15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5.081.480.000,00	4.561.214.510,00	(520.265.490,00)	89,76
0101	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	5.081.480.000,00	4.561.214.510,00	(520.265.490,00)	89,76



16	Penanaman Modal	5.889.940.000,00	5.307.106.394,00	(582.833.606,00)	90,10
0101	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	5.889.940.000,00	5.307.106.394,00	(582.833.606,00)	90,10
18	Kepemudaan dan Olah Raga	5.179.700.500,00	4.642.708.745,00	(536.991.755,00)	89,63
0101	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	5.179.700.500,00	4.642.708.745,00	(536.991.755,00)	89,63
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	11.539.800.000,00	10.757.415.500,00	(782.384.500,00)	93,22
0101	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.239.040.000,00	3.009.667.016,00	(229.372.984,00)	92,92
0301	Satuan Polisi Pamong Praja	8.300.760.000,00	7.747.748.484,00	(553.011.516,00)	93,34
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandi	455.460.611.966,00	413.035.154.147,00	(42.425.457.819,00)	90,69
0101	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12.892.833.100,00	12.082.032.974,00	(810.800.126,00)	93,71
0201	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.428.950.000,00	1.393.385.464,00	(35.564.536,00)	97,51
0301	Sekretariat Daerah	16.911.840.000,00	15.199.663.246,00	(1.712.176.754,00)	89,88
0401	Sekretariat DPRD	4.341.620.000,00	3.795.995.633,00	(545.624.367,00)	87,43
0501	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	53.248.914.892,00	42.338.892.362,00	(10.910.022.530,00)	79,51
0502	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKD)	292.810.588.194,00	272.009.380.076,00	(20.801.208.118,00)	92,90
0601	Badan Kepegawaian Daerah	4.382.700.000,00	3.745.544.679,00	(637.155.321,00)	85,46
0701	Inspektorat Kabupaten	4.294.240.000,00	3.947.590.302,00	(346.649.698,00)	91,93
0801	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.420.307.000,00	5.023.307.586,00	(396.999.414,00)	92,68
0901	Kecamatan Sidoarjo	9.147.550.000,00	8.744.760.862,00	(402.789.138,00)	95,60
1001	Kecamatan Candi	3.320.095.000,00	2.987.405.057,00	(332.689.943,00)	89,98
1101	Kecamatan Buduran	2.495.260.000,00	2.198.154.461,00	(297.105.539,00)	88,09
1201	Kecamatan Wonoayu	3.072.312.500,00	2.780.024.901,00	(292.287.599,00)	90,49
1301	Kecamatan Krian	3.791.366.680,00	3.281.786.616,00	(509.580.064,00)	86,56
1401	Kecamatan Porong	4.026.977.500,00	3.624.614.079,00	(402.363.421,00)	90,01
1501	Kecamatan Krembung	2.427.780.000,00	2.145.053.452,00	(282.726.548,00)	88,35
1601	Kecamatan Jabon	2.051.240.000,00	1.716.373.753,00	(334.866.247,00)	83,67
1701	Kecamatan Balongbendo	2.362.760.000,00	2.182.477.824,00	(180.282.176,00)	92,37
1801	Kecamatan Tarik	2.431.007.500,00	1.982.088.485,00	(448.919.015,00)	81,53



1901	Kecamatan Taman	5.864.810.000,00	5.346.275.947,00	(518.534.053,00)	91,16
2001	Kecamatan Waru	2.499.380.000,00	2.223.605.574,00	(275.774.426,00)	88,97
2101	Kecamatan Gedangan	2.281.000.000,00	2.139.327.845,00	(141.672.155,00)	93,79
2201	Kecamatan Sedati	2.566.890.000,00	2.201.248.692,00	(365.641.308,00)	85,76
2301	Kecamatan Tanggulangin	2.299.520.000,00	2.140.949.685,00	(158.570.315,00)	93,10
2401	Kecamatan Tulangan	3.003.330.000,00	2.696.705.839,00	(306.624.161,00)	89,79
2501	Kecamatan Prambon	2.868.434.600,00	2.506.174.128,00	(362.260.472,00)	87,37
2601	Kecamatan Sukodono	2.398.260.000,00	2.073.410.078,00	(324.849.922,00)	86,45
2701	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	820.645.000,00	528.924.547,00	(291.720.453,00)	64,45
21	Ketahanan Pangan	9.336.160.000,00	8.605.848.023,00	(730.311.977,00)	92,18
0101	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	9.336.160.000,00	8.605.848.023,00	(730.311.977,00)	92,18
22	Pemberdayaan Masyarakat Desa	12.722.100.000,00	11.677.336.833,00	(1.044.763.167,00)	91,79
0101	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	12.722.100.000,00	11.677.336.833,00	(1.044.763.167,00)	91,79
26	Perpustakaan	2.108.720.000,00	1.818.201.405,00	(290.518.595,00)	86,22
0101	Kantor Perpustakaan dan Arsip	2.108.720.000,00	1.818.201.405,00	(290.518.595,00)	86,22
URUSAN PILIHAN					
01	Pertanian	7.843.741.250,00	6.858.166.985,00	(985.574.265,00)	87,43
0101	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	7.843.741.250,00	6.858.166.985,00	(985.574.265,00)	87,43
05	Kelautan dan Perikanan	3.434.510.000,00	3.087.855.928,00	(346.654.072,00)	89,91
0101	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.434.510.000,00	3.087.855.928,00	(346.654.072,00)	89,91
06	Perdagangan	14.135.260.000,00	12.904.205.971,00	(1.231.054.029,00)	91,29
0201	Dinas Pasar	14.135.260.000,00	12.904.205.971,00	(1.231.054.029,00)	91,29
	J u m l a h	25.413.511.250,00	22.850.228.884,00	(2.563.282.366,00)	89,91

Sumber Data : DPPKA Unaudited BPK



Tabel 3.2
Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014

Kode		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
URUSAN WAJIB					
01	Pendidikan	233.405.759.174,54	97.068.056.481,00	(136.337.702.693,54)	41,59
0101	Dinas Pendidikan	233.405.759.174,54	97.068.056.481,00	(136.337.702.693,54)	41,59
02	Kesehatan	428.396.668.406,66	379.790.519.972,67	(48.606.148.433,99)	88,65
0101	Dinas Kesehatan	156.712.083.120,00	114.381.224.256,00	(42.330.858.864,00)	72,99
0202	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	271.684.585.286,66	265.409.295.716,67	(6.275.289.569,99)	97,69
03	Pekerjaan Umum	516.336.335.824,00	428.229.564.310,34	(88.106.771.513,66)	82,94
0101	Dinas PU Bina Marga	222.379.407.987,00	187.662.823.832,34	(34.716.584.154,66)	84,39
0201	Dinas PU Pengairan	103.424.873.982,00	97.060.944.510,00	(6.363.929.472,00)	93,85
0301	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang	190.532.053.855,00	143.505.795.968,00	(47.026.257.887,00)	75,32
06	Perencanaan Pembangunan	16.382.702.800,00	14.735.355.095,00	(1.647.347.705,00)	89,94
0101	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.382.702.800,00	14.735.355.095,00	(1.647.347.705,00)	89,94
07	Perhubungan	20.664.551.000,00	19.314.464.214,00	(1.350.086.786,00)	93,47
0101	Dinas Perhubungan	20.664.551.000,00	19.314.464.214,00	(1.350.086.786,00)	93,47
08	Lingkungan Hidup	155.884.891.350,00	141.094.582.745,00	(14.790.308.605,00)	90,51
0101	Badan Lingkungan Hidup	5.246.516.000,00	4.269.436.451,00	(977.079.549,00)	81,38
0201	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	150.638.375.350,00	136.825.146.294,00	(13.813.229.056,00)	90,83
10	Kependudukan dan Catatan Sipil	4.735.955.000,00	4.419.762.100,00	(316.192.900,00)	93,32
0101	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.735.955.000,00	4.419.762.100,00	(316.192.900,00)	93,32
13	Sosial	19.250.824.983,00	13.444.716.737,00	(5.806.108.246,00)	69,84
0101	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	19.250.824.983,00	13.444.716.737,00	(5.806.108.246,00)	69,84
15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	18.201.652.200,00	16.261.170.661,00	(1.940.481.539,00)	89,34
0101	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	18.201.652.200,00	16.261.170.661,00	(1.940.481.539,00)	89,34



16	Penanaman Modal	4.255.918.500,00	3.923.840.994,00	(332.077.506,00)	92,20
0101	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	4.255.918.500,00	3.923.840.994,00	(332.077.506,00)	92,20
18	Kepemudaan dan Olah Raga	9.282.579.000,00	8.634.880.199,00	(647.698.801,00)	93,02
0101	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	9.282.579.000,00	8.634.880.199,00	(647.698.801,00)	93,02
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	26.291.712.925,00	21.955.213.742,00	(4.336.499.183,00)	83,51
0101	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.241.727.000,00	3.793.190.551,00	(448.536.449,00)	89,43
0301	Satuan Polisi Pamong Praja	22.049.985.925,00	18.162.023.191,00	(3.887.962.734,00)	82,37
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandi	182.955.956.741,00	147.424.758.774,00	(35.531.197.967,00)	80,58
0101	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				
0201	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
0301	Sekretariat Daerah	46.939.080.658,00	41.868.844.592,00	(5.070.236.066,00)	89,20
0401	Sekretariat DPRD	34.008.071.280,00	25.728.691.096,00	(8.279.380.184,00)	75,65
0501	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	40.178.208.393,00	23.632.292.890,00	(16.545.915.503,00)	58,82
0502	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKD)				
0601	Badan Kepegawaian Daerah	8.411.457.000,00	7.076.215.893,00	(1.335.241.107,00)	84,13
0701	Inspektorat Kabupaten	3.978.470.100,00	3.547.257.111,00	(431.212.989,00)	89,16
0801	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.135.990.122,00	8.325.027.197,00	(810.962.925,00)	91,12
0901	Kecamatan Sidoarjo	5.126.238.500,00	4.669.446.636,00	(456.791.864,00)	91,09
1001	Kecamatan Candi	1.991.341.200,00	1.931.972.695,00	(59.368.505,00)	97,02
1101	Kecamatan Buduran	1.893.302.550,00	1.813.325.533,00	(79.977.017,00)	95,78
1201	Kecamatan Wonoayu	1.668.895.700,00	1.628.120.315,00	(40.775.385,00)	97,56
1301	Kecamatan Krian	2.449.359.800,00	2.243.671.160,00	(205.688.640,00)	91,60
1401	Kecamatan Porong	2.496.793.900,00	1.782.404.016,00	(714.389.884,00)	71,39
1501	Kecamatan Krembung	1.396.537.000,00	1.335.222.585,00	(61.314.415,00)	95,61
1601	Kecamatan Jabon	1.579.928.550,00	1.471.760.945,00	(108.167.605,00)	93,15



1701	Kecamatan Balongbendo	2.011.739.500,00	1.961.721.416,00	(50.018.084,00)	97,51
1801	Kecamatan Tarik	1.818.552.800,00	1.769.664.209,00	(48.888.591,00)	97,31
1901	Kecamatan Taman	3.683.847.200,00	3.486.287.850,00	(197.559.350,00)	94,64
2001	Kecamatan Waru	2.057.906.988,00	1.897.243.272,00	(160.663.716,00)	92,19
2101	Kecamatan Gedangan	1.396.305.500,00	1.312.461.165,00	(83.844.335,00)	94,00
2201	Kecamatan Sedati	1.728.246.550,00	1.682.731.300,00	(45.515.250,00)	97,37
2301	Kecamatan Tanggulangin	1.602.340.300,00	1.445.419.741,00	(156.920.559,00)	90,21
2401	Kecamatan Tulangan	2.571.789.450,00	2.276.292.317,00	(295.497.133,00)	88,51
2501	Kecamatan Prambon	1.936.507.400,00	1.869.142.400,00	(67.365.000,00)	96,52
2601	Kecamatan Sukodono	1.605.824.300,00	1.518.289.246,00	(87.535.054,00)	94,55
2701	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	1.289.222.000,00	1.151.253.194,00	(137.968.806,00)	89,30
21	Ketahanan Pangan	4.820.765.500,00	4.566.642.810,00	(254.122.690,00)	94,73
0101	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	4.820.765.500,00	4.566.642.810,00	(254.122.690,00)	94,73
22	Pemberdayaan Masyarakat Desa	13.242.926.658,00	11.810.105.505,00	(1.432.821.153,00)	89,18
0101	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	13.242.926.658,00	11.810.105.505,00	(1.432.821.153,00)	89,18
26	Perpustakaan	3.423.810.600,00	3.270.193.307,00	(153.617.293,00)	95,51
0101	Kantor Perpustakaan dan Arsip	3.423.810.600,00	3.270.193.307,00	(153.617.293,00)	95,51
URUSAN PILIHAN					
01	Pertanian	29.003.059.660,00	23.104.371.279,00	(5.898.688.381,00)	79,66
0101	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	29.003.059.660,00	23.104.371.279,00	(5.898.688.381,00)	79,66
05	Kelautan dan Perikanan	99.585.988.191,00	96.735.920.793,00	(2.850.067.398,00)	97,14
0101	Dinas Kelautan dan Perikanan	99.585.988.191,00	96.735.920.793,00	(2.850.067.398,00)	97,14
06	Perdagangan	9.618.517.500,00	8.233.779.824,00	(1.384.737.676,00)	85,60
0201	Dinas Pasar	9.618.517.500,00	8.233.779.824,00	(1.384.737.676,00)	85,60
	J u m l a h	1.795.740.576.013,20	1.444.017.899.543,01	(351.722.676.470,19)	80,41

Sumber Data : DPPKA Unaudited BPK



4. Permasalahan Dan Solusi

Dalam merealisasikan belanja daerah pada tahun anggaran 2014 ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Pengeluaran untuk belanja pegawai (gaji dan tunjangan) tidak optimal karena perhitungan penganggaran untuk acres gaji melebihi 5% dari ketetapan gajinya dan belanja tidak langsung non belanja pegawai masih belum optimal; utamanya untuk belanja Bantuan Sosial karena kecukupan dan persyaratan penganggaran dan pencirannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang mendasarinya.
- b. Pengeluaran yang digunakan untuk belanja program sesuai dengan prioritas kebutuhan masih dirasa belum sepenuhnya optimal untuk memenuhi harapan misalnya dana yang bersumber dari DAK tahun 2014 hanya terealisasi sebesar 75%, rendahnya penyerapan DAK utamanya dari DAK pendidikan sehingga dalam tahun 2014 terdapat penanguhan realisasi belanja untuk ;
 - 1) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi (Pembangunan/rehabilitasi) ruang belajar;
 - 2) Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium;
 - 3) Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan;
 - 4) Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembelajaran Sekolah
- c. Capaian Indikator kinerja yang dinyatakan dalam RKA – DPA tidak sepenuhnya terkorelasi dengan indikator sasaran pada RPJMD nya;
- d. Pemilihan/Penetapan Program/Kegiatan oleh SKPD belum sepenuhnya memperhatikan urusan pemerintahan secara tepat.
- e. Pengadaan tanah merupakan masalah yang cukup pelik untuk cepat diselesaikan sehingga berdampak pula pada aktivitas pembangunan gedungnya baik untuk tanah gedung sekolah



maupun tanah gedung perkantoran, tahun 2014 realisasi belanja modal pengadaan tanah hanya 27,38% dari total anggaran sebesar Rp 77.731.386101,00.

Guna mengatasi permasalahan diatas maka upaya yang dilakukan adalah perlunya dilakukan tindak verifikasi RKT/Renja sehingga pada saat digunakan sebagai dasar penyusunan RKA - SKPD sudah terjadi kesejajaran antara urusan yang dipilih, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerjanya, melakukan tindak efisiensi serta penghematan pengeluaran berbagai kegiatan namun dengan tetap memperhatikan bahwa program kegiatan yang sifatnya berkelanjutan tidak terganggu, sedangkan untuk pengadaan tanah dilakukan koordinasi secara intens dengan instansi dan lembaga terkait serta pendekatan secara kondusif kepada masyarakat yang lahannya akan dibebaskan.

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Struktur pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, selisih dari keduanya disebut sebagai pembiayaan netto, yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Total anggaran pembiayaan netto Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 sebesar Rp. 449.041.240.761,34. Nilai sejumlah itu akan digunakan untuk menutupi rencana defisit / anggaran defisit tahun berjalan sebesar Rp. (449.041.240.761,34).

Anggaran pembiayaan netto direncanakan dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 496.191.240.761,34 dikurangi dengan



rencana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 47.150.000.000,00, namun demikian realisasinya adalah surplus sebesar Rp. 266.971.600.840,15, sehingga menambah Silpa berjalan pada akhir tahun 2014.

Realisasi atas Pembiayaan Neto yang semula dianggarkan sebesar Rp. 360.723.769.347,75 realisasinya turun menjadi sebesar Rp. 358.838.083.238,77 atas surplus (defisit) yang semula dianggarkan sebagai defisit sebesar Rp . (360.723.769.347,75)

Realisasi pembiayaan *Netto* tahun 2014 turun sebesar Rp. 1.885.686.108,98 dari yang dianggarkan sebesar Rp. 360.723.769.347,75 terealisasi sebesar Rp. 358.838.083.238,77.

Berkurangnya defisit tahun berjalan bahkan menjadi surplus utamanya disebabkan :

- a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah melampaui target yang ditetapkan
- b. Realisasi Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah juga melampaui target yang ditetapkan
- c. Realisasi Belanja tidak langsung gaji selain karena adanya efisiensi juga karena adanya tunjangan jabatan yang tidak terealisasi optimal karena belum terisinya seluruh jabatan structural selain itu acres gaji yang cukup tinggi, sedangkan untuk belanja tidak langsung nan gaji uatamanya belanja bantuan sosial karena penganggaran dan pencairan anggaran belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Realisasi Belanja langsung untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa pada umumnya karena adanya efisiensi, sedangkan untuk belanja modal kecenderungan karena adanya penanguhan kegiatan uatamanya pengadaan tanah yang



mengalami kesulitan dan proses waktu yang lama, sehingga berdampak pada penangguhan pembangunan gedungnya.

Struktur Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

PEMBIAYAAN DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Surplus/Defisit	(449.041.240.761,34)	266.971.600.840,15	716.012.841.601,49	(59,45)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	496.191.240.761,34	492.543.358.404,06	(3.647.882.357,28)	99,26
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	484.291.240.761,34	484.291.240.761,34	0,00	100,00
Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	11.900.000.000,00	8.252.117.642,72	(3.647.882.357,28)	69,35
			0,00	
Pengeluaran Pembiayaan daerah	47.150.000.000,00	44.763.000.000,00	(2.387.000.000,00)	94,94
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	47.150.000.000,00	44.763.000.000,00	(2.387.000.000,00)	94,94
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	35.250.000.000,00	35.250.000.000,00	0,00	100,00
Badan Usaha Swasta	11.900.000.000,00	9.513.000.000,00	(2.387.000.000,00)	79,94
Pembiayaan Netto	449.041.240.761,34	447.780.358.404,06	(1.260.882.357,28)	99,72
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	714.751.959.244,21	714.751.959.244,21	

Sumber Data : DPPKA Unaudited BPK

Sisa anggaran lebih tahun 2014 tersebut berasal dari sumber dana sebagai berikut :

NO	SUMBER DANA – UNTUK KEPERLUAN	JUMLAH
		(Rp)
1	Dana Daerah	462.180.506.626,06
2.	Dana DAU	2.172.662.048,34
3.	Eks Sisa Dana DAK tahun 2014 dan tahun sebelumnya	67.102.613.814,00
4.	Dana Tunjangan Profesi Guru	80.217.452.360,00
5.	Kekurangan Penghasilan/Gaji Guru	13.649.712.500,00
6.	KAS DI RSUD (tatakelola) BLUD	67.703.776.824,33
7.	Kas di Bendahara JKN (Puskemas)	7.050.531.145,48



8.	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	378.042.000,00
9.	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	6.836.969.704,00
10.	DID	6.822.022.982,00
11.	DPDF	3.028.750,00
12.	DPPIP	245.426.000,00
13.	DIPIPD	75.000.000,00
14.	DPPID	138.339.250,00
15.	Dana Daerah Proyek Pemerintah Desentralisasi	16.779.000,00
		714.751.959.244,21

Sisa anggaran lebih tahun 2014 yang berasal/bersumber dari dana daerah dan DAU dapat digunakan secara bebas baik untuk belanja tidak langsung maupun belanja langsung, namun demikian proses penganggarannya tetap harus memperhatikan adanya penangguhan kegiatan dan didasarkan pada ketentuan yang berlaku, sedangkan yang bersumber dari dana selain dana daerah dan DAU harus didasarkan pada Petunjuk Teknisnya maupun ketentuan lain yang dipersamakan.